

TESIS

**PENGARUH INDIKATOR MAKROEKONOMI, UPAH
MINIMUM, DAN DEMOGRAFIS TERHADAP
PENGANGGURAN DI INDONESIA**

**THE EFFECT OF MACROECONOMIC INDICATORS,
MINIMUM WAGE, AND DEMOGRAPHIC ON
UNEMPLOYMENT IN INDONESIA**

Nursinah Amrullah



**PROGRAM MAGISTER
EKONOMI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2022**

TESIS

**PENGARUH INDIKATOR MAKROEKONOMI, UPAH
MINIMUM, DAN DEMOGRAFIS TERHADAP
PENGANGGURAN DI INDONESIA**

**THE EFFECT OF MACROECONOMIC INDICATORS,
MINIMUM WAGE, AND DEMOGRAPHIC ON
UNEMPLOYMENT IN INDONESIA**

Disusun dan diajukan oleh:

**Nursinah Amrullah
A032191007**



kepada

**PROGRAM MAGISTER
EKONOMI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2022**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**PENGARUH INDIKATOR MAKROEKONOMI, UPAH MINIMUM DAN DEMOGRAFIS TERHADAP
PENGANGGURAN DI INDONESIA**

Disusun dan diajukan oleh

**NURSINAH AMRULLAH
A032191007**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi
Program Magister **EKONOMI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN** Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Universitas Hasanuddin

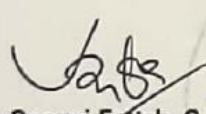
Pada tanggal 15 AGUSTUS 2022

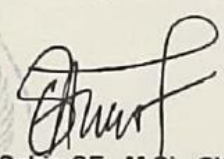
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

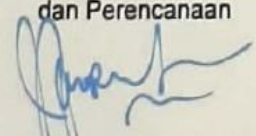
Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Sanusi Fattah, S.E., M.Si., CWM®
NIP. 19690413 199403 1 003


Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM®
NIP. 19740715 200212 1 003

Ketua Program Studi
Magister Ekonomi Pembangunan
dan Perencanaan


Dr. Indraswati Tri Abdireviane, S.E., M.A., CWM®
NIP. 19651012 199903 2 001

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin


Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si.
NIP. 19640205 198810 1 001



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nursinah Amrullah

NIM : A032191007

Program Studi: Magister Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul

Pengaruh Indikator Makroekonomi, Upah Minimum, Dan Demografis Terhadap Pengangguran Di Indonesia

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Nomor 20 Tahun 2003 pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 15 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan

A handwritten signature in black ink is written over a red and white revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '10000', and 'METERAI TEMPEL'. A unique identification number '35CAJX969302230' is printed at the bottom of the stamp.

Nursinah Amrullah

Kata Pengantar

Segala puja dan puji hanya untuk Allah SWT, dzat yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, yang tak henti-hetinya memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada seluruh ummat manusia. Berkat izin-Nya pula lah penulis mampu menyelesaikan Tesis yang berjudul “PENGARUH INDIKATOR MAKROEKONOMI, UPAH MINIMUM DAN DEMOGRAFIS TERHADAP PENGANGGURAN DI INDONESIA”. Tak lupa pula penulis hanturkan shalawat teriring salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sang pejuang kemanusiaan, pembela kaum tertindas, yang telah menjadi suri tauladan umat menuju gerbang pencerahan, semoga kelak penulis mampu mengikuti jejak perjuangan Beliau. Aamiin. Tesis ini merupakan sebuah karya penulis yang masih jauh dari sempurna, sebuah tulisan yang bahkan oleh penulis sendiripun tak akan menyangkal untuk mengakuinya sebagai sebuah karya yang belum layak baca. Akan tetapi sebagai sebuah proses awal, penulis berharap tulisan ini mampu memberikan banyak pelajaran dan mampu menjadi pemantik semangat dalam melahirkan karya-karya selanjutnya. Karya yang mendidik, karya yang jujur, dan tentu saja karya yang telah layak baca. Harapan itu tidak hanya untuk penulis sendiri tapi untuk para pembaca sekalian, baik yang sengaja maupun yang secara tak sengaja membaca Tesis ini. Banyak kendala yang penulis hadapi dalam rangka penyusunan tesis ini, dan hanya berkat bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihaklah penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagaimana mestinya.


Akhirnya, penulis mengucapkan rasa hormat dan penuh kepatuhan serta terima kasih yang tak terhingga atas keikhlasan kedua orangtua, Ayahanda

Ir.H.Amrullah,M.Mpub dan Ibunda Dra.Hj.Sulaeha, dalam mendidik, membesarkan, dan mendoakan penulis. Penulis juga sangat bersyukur dan merasa beruntung karena tidak hanya sebagai orangtua, keduanya juga sangat berperan dalam memberikan petunjuk, doa, saran, motivasi dan telah memberikan niat dan ruh suci dan keikhlasan dalam menuntut ilmu sehingga penulis dapat mencapai cita-cita. Hal yang sama penulis ucapkan kepada Saudara penulis, Adek Muhammad Fajar Amrullah dan Nurul Khaeriyah Amrullah yang selalu memberikan semangat semasa penyusunan tesis ini.

Dalam kesempatan ini, penulis dengan tulus menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dr.Sanusi Fattah,SE.,M.SI.,CWM® sebagai Pembimbing I dan Bapak Dr.Sabir,SE.,M.Si,CWM®. sebagai Pembimbing II atas segala bantuan dan bimbingannya yang diberikan selama menyelesaikan tesis ini. Atas segala bantuan yang penulis terima selama mengikuti program S2, penulis mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Hasanuddin, Dekan Fakultas Ekonomi Unhas, Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si., CIPM. Beserta para Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Unhas. Terimah kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh dosen yang pernah mengajar penulis pada Program S2 Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan Unhas dan kepada seluruh anggota tim penguji yang telah meluangkan waktu dalam meneliti keabsahan dan memberikan kritik serta saran yang sangat berguna atas penyempurnaan tesis ini. Terima kasih penulis ucapkan juga kepada seluruh staf akademik Pasca Ekonomi Unhas yang dengan senang hati membantu penulis dalam menyelesaikan urusan akademik. Penulis tidak lupa untuk menyampaikan terima kasih kepada seluruh teman-teman MEPP Unhas 2019, Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada teman berbagai

semangat semasa kuliah yaitu Ririn Mardhani Syakur, Cici Mahmut, Zulfi Kadri, Kak hadariah, kak daya dan Shaleh Rahim, yang senantiasa membantu penulis serta semangat dan doa yang tiada henti serta teman-teman dan para sahabat di Pasca Ekonomi dan Bisnis UNHAS MEPP, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik. Maha Suci Engkau Ya Allah tidaklah ada yang kami ketahui selain apa yang Engkau telah beritahukan kepada kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui segala hikmah. Engkau memberi hikmah kepada siapa saja yang dianugrahi karunia yang banyak dan hanya orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran.

Makassar, 15 Agustus 2022



Nursinah Amrullah

ABSTRAK

NURSINAH AMRULLAH. *Pengaruh Indikator Makroekonomi , Upah Minimum, dan Demografis terhadap Pengangguran di Indonesia (dibimbing oleh Sanusi Fattah dan Sabir).*

Penelitian ini bertujuan: 1) menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pengangguran secara langsung dan tidak langsung melalui investasi dan pertumbuhan ekonomi, 2) menganalisis pengaruh upah minimum terhadap pengangguran secara langsung dan tidak langsung melalui investasi dan pertumbuhan ekonomi, dan 3) menganalisis pengaruh upah minimum terhadap pengangguran secara langsung dan tidak langsung melalui investasi dan pertumbuhan ekonomi. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian pustaka. Analisis data dilakukan dengan uji regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, indikator makroekonomi (pengeluaran pemerintah) berpengaruh negatif, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pengangguran. Jika pengeluaran pemerintah bertambah maka pengangguran akan berkurang. *Kedua*, upah minimum berpengaruh positif, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pengangguran. Jika upah minimum meningkat maka pengangguran juga akan meningkat. *Ketiga*, demografis secara langsung berpengaruh positif terhadap pengangguran yang berarti jika demografis meningkat maka pengangguran juga meningkat. Demografis secara tidak langsung berpengaruh negatif terhadap pengangguran yang berarti jika demografis melalui investasi dan pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan maka pengangguran akan berkurang.

Kata kunci: Indikator Makroekonomi, Upah Minimum, Demografi Pengangguran



ABSTRACT

NURSINAH AMRULLAH. *The Effect of Macroeconomic Indicators, Minimum Wage, and Demographic on Unemployment in Indonesia* (Supervised by Sanusi Fattah and Sabir)

This study aims: (1) to analyze the direct and indirect effect of government spending on unemployment through investment and economic growth; (2) to analyze the effect of the minimum wage on unemployment directly and indirectly through investment and economic growth; and (3) to analyze the effect of minimum wage on unemployment, minimum wage to unemployment directly and indirectly through investment and economic growth. Data collection in this study was carried out by library research. Data analysis was performed by regression test. The results of the study show that: 1) macroeconomic indicators (government spending) have a negative effect, either directly or indirectly on unemployment. If government spending increases, unemployment will decrease; 2) the minimum wage has a positive effect, either directly or indirectly on unemployment. If the minimum wage increases, unemployment will also increase; and 3) demographics directly have a positive effect on unemployment, which means that if demographics increase, unemployment will also increase. Demographics indirectly have a negative effect on unemployment, which means that if demographics through investment and economic growth increase, unemployment will decrease.

Keywords: macroeconomic indicators, minimum wage, demographics, unemployment



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN TEORITIS	10
2.1 Grand Theory.....	10
2.2 Indikator Makroekonomi	11
2.3 Pertumbuhan Ekonomi	11
2.4 Investasi	16
2.5 Pengeluaran Pemerintah	21
2.6 Upah Minimum	24
2.7 Demografis	26
2.8 Pengangguran	29
2.9 Hubungan Antar Variabel	34
2.10 Penelitian Terdahulu	40
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	42
3.1 Kerangka Konseptual	42
3.2 Hipotesis	44
BAB IV METODE PENELITIAN	45
4.1 Jenis Penelitian.....	45

4.2	Lokasi dan Waktu Penelitian	45
4.3	Jenis dan Sumber Data	46
4.4	Teknik Pengumpulan Data	46
4.5	Teknik Analisis Data.....	46
4.6	Variabel dan Definisi Operasional	48
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
5.1	Deskripsi Data.....	51
5.2	Hasil Penelitian	54
5.3	Pembahasan	59
BAB VI	PENUTUP.....	73
6.1	Kesimpulan	73
6.2	Implikasi	74
6.3	Keterbatasan	74
6.4	Saran	74
	DAFTAR PUSTAKA.....	75
	LAMPIRAN	77

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1	Data Pengangguran Terbuka di Indonesia 2019-2020	3
5.1	Pengaruh Antar Variabel	54
5.2	Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Variabel Independen ke Variabel Dependen	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
2.1	Bagan Kerangka Konseptual Penelitian.....	44
5.1	Grafik Indikator Makroekonomi, Upah Minimum dan Demografis dalam Kaitannya dengan Pengangguran, Terkait Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	Data Pengeluaran Pemerintah	82
2	Data Upah Minimum	83
3	Data Demografi	84
4	Data Investasi	85
5	Data Pertumbuhan Ekonomi	86
6	Data Pengangguran	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengangguran memang merupakan masalah yang rumit bagi setiap negara, tidak terkecuali bagi Indonesia. Permasalahan seputar pengangguran memang selalu menjadi pokok masalah sosial di negara berkembang seperti Indonesia. Pengangguran umumnya terjadi akibat dari jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Sebagai akibatnya timbul masalah-masalah sosial yang dapat merugikan personal maupun negara.

Pengangguran terjadi disebabkan antara lain, yaitu karena kondisi ekonomi, Pengembangan sektor ekonomi non-real, pendidikan yang rendah dan tidak memiliki keterampilan, keterbatasan lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja, kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja, memiliki pendidikan yang tinggi tapi tidak memiliki peluang kerja dikarenakan tidak memiliki akses sehingga berpotensi untuk tidak dapat tertampungnya lulusan program pendidikan di lapangan kerja setiap tahun selalu meningkat tidak pernah mengalami penurunan, budaya suatu daerah dimana yang berkerja itu hanya perempuan saja sementara kaum adam tidak berkerja, Selain itu juga kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja. Fenomena pengangguran juga berkaitan erat dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja, yang disebabkan antara lain; perusahaan yang menutup/mengurangi bidang usahanya akibat krisis ekonomi atau keamanan

yang kurang kondusif; peraturan yang menghambat investasi, hambatan dalam proses ekspor impor, dan lain-lain.

Masalah pengangguran selalu menjadi permasalahan yang sulit terpecahkan disetiap negara. Sebab jumlah penduduk yang bertambah semakin besar tiap tahunnya, akan menyebabkan meningkatnya jumlah orang pencari kerja, dan seiring itu tenaga kerja juga akan bertambah. Jika tenaga kerja tidak dapat terserap ke dalam lapangan pekerjaan maka mereka akan tergolong ke dalam orang yang menganggur. Pengangguran merupakan masalah yang sangat kompleks karena mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berinteraksi mengikuti pola yang tidak selalu mudah dipahami. Apabila pengangguran tersebut tidak segera diatasi maka dapat menimbulkan kerawanan sosial dan berpotensi mengakibatkan kemiskinan.

Masalah pengangguran memang selalu menjadi suatu persoalan yang perlu dipecahkan dalam perekonomian Negara Indonesia. Bertambahnya jumlah penduduk yang semakin besar setiap tahunnya membawa akibat bertambahnya jumlah angkatan kerja sama dengan jumlah orang yang mencari pekerjaan akan meningkat, dan juga diikuti bertambahnya tenaga kerja. Pengangguran dimulai ketika penduduk usia muda telah memenuhi syarat untuk bekerja (Axelrad, dkk, 2018). Oleh karena itu pemerintah harus segera memikirkan masalah pengangguran ini, sehingga dapat memutuskan langkah-langkah yang strategis sebagai upaya penanganan permasalahan pengangguran. Pengangguran menurut Keynes (Sukirno, 2004) dianggap selalu wujud dalam perekonomian karena permintaan efektif yang wujud dalam masyarakat (pengeluaran agregat) adalah lebih rendah dari kemampuan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa.

Tabel 1. Data Pengangguran Terbuka di Indonesia 2019-2020

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Februari 2019	Februari 2020	Perubahan Feb 2019–Feb 2020	
	juta orang	juta orang	juta orang	persen
Penduduk Usia Kerja	196,46	199,38	2,92	1,49
Angkatan Kerja	136,18	137,91	1,73	1,27
Bekerja	129,36	131,03	1,67	1,29
Pengangguran	6,82	6,88	0,06	0,88
Bukan Angkatan Kerja	60,28	61,47	1,19	1,97

Sumber: Badan Pusat Statistik 2020

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. TPT Februari 2019 sebesar 6,82 juta orang dan meningkat menjadi 6,88 juta orang pada Februari 2020.

Pengangguran merupakan salah satu penyakit ekonomi yang sangat berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi. Pengangguran mengakibatkan orang tidak memiliki pendapatan dan mendorong mereka jatuh ke jurang kemiskinan. Secara umum pemerintah mengatasi pengangguran dengan mengupayakan memperluas kesempatan kerja, baik di sektor pemerintahan maupun sektor swasta.

Masalah pengangguran erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi ada, maka secara langsung akan menyerap tenaga kerja. Tetapi jika pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya hanya mampu menyerap tenaga lebih kecil dari jumlah pencari kerja, maka akan menyebabkan adanya sisa pencari kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan sehingga jumlah pengangguran di Indonesia semakin meningkat. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi akan mempengaruhi stabilitas nasional setiap negara. Sehingga tiap negara berusaha untuk mempertahankan tingkat pengangguran pada tingkat

yang wajar. Dalam teori makro ekonomi, masalah pengangguran pada pasar tenaga kerja yang juga dihubungkan dengan keseimbangan antara tingkat upah dan tenaga kerja. Tingkat pengangguran alamiah adalah suatu tingkat pengangguran yang alamiah dan tak mungkin dihilangkan. Artinya jika tingkat pengangguran paling tinggi 2-3% itu berarti bahwa perekonomian dalam kondisi penggunaan tenaga kerja penuh (*full employment*) (Sukirno, 2007).

Salah satu aspek yang sangat mempengaruhi angka pengangguran adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan permasalahan jangka panjang yang dihadapi oleh suatu negara dalam upaya meningkatkan pendapatan nasional riil. Sukirno (2007) menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai oleh suatu negara. Pertumbuhan ekonomi mengukur seberapa besar keberhasilan suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mengalami penambahan jumlah dan kualitas sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan bila pendapatan riil masyarakat pada tahun tertentu lebih besar dari pada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya. Dalam pengertian ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi adalah penambahan Produk Domestik Bruto (PDB), yang berarti peningkatan Pendapatan Nasional (Tambunan, 2012).

Ekonomi Indonesia tahun 2019 tumbuh 5,02 persen, lebih rendah dibanding capaian tahun 2018 sebesar 5,17 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 10,55 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah Tangga (PK-

LNPRT) sebesar 10,62 persen. Sementara pada Triwulan I 2020 ekonomi Indonesia tumbuh 2,97% dan turun pada Triwulan II 5,32% (Badan Pusat Statistik, 2020).

Pengeluaran pemerintah dapat dikatakan sebagai alat intervensi pemerintah terhadap perekonomian yang dianggap paling efektif. Selama ini, tingkat efektifitas pengeluaran pemerintah dapat diukur melalui seberapa besar pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah suatu negara menggambarkan suatu pembiayaan terhadap kegiatan pemerintah. Pengeluaran pemerintah memberikan gambaran tentang pengeluaran pemerintah atas fasilitas dan pelayanan untuk pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, biasanya setiap tahun (Jeff-Anyeneh & Ibenta, 2019).

Pengeluaran pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercermin dalam realisasi anggaran belanja rutin dan realisasi anggaran belanja pembangunan. Selain itu, keberhasilan pembangunan di suatu daerah disamping ditentukan oleh besarnya pengeluaran pemerintah juga dipengaruhi oleh besarnya investasi. Investasi atau penanaman modal adalah pembelian barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa yang dibutuhkan dalam perekonomian. Investasi disebut sebagai *engine of growth*, oleh karena itu tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan pada umumnya didukung oleh peningkatan investasi karena investasi berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Aurangzeb & Haq, 2012).

Pertumbuhan ekonomi banyak dipengaruhi oleh sektor industri yang menyerap banyak tenaga kerja. Salah satu hal yang terkait antara pelaku industri dan pekerja adalah upah minimum. Pekerja atau buruh, pengusaha, pemerintah

dan masyarakat pada umumnya mempunyai kepentingan yang sama atas sistem dan kebijakan pengupahan. Pekerja atau buruh dan keluarganya sangat tergantung pada upah yang mereka terima untuk dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan dan kebutuhan lainnya. Oleh karena itu para pekerja dan serikat pekerja atau serikat buruh selalu mengharapkan upah yang lebih besar untuk meningkatkan taraf hidupnya (Sinaga, 2008). Kebijakan Upah Minimum telah menjadi hal yang penting dalam masalah ketenagakerjaan di beberapa negara baik maju maupun berkembang. Sasaran dari kebijakan upah minimum ini adalah untuk menutupi kebutuhan hidup minimum dari pekerja dan keluarganya. Selain itu yang menjadi tantangan ke depan adalah banyaknya jumlah pencari kerja yang didorong perubahan demografi di Indonesia.

Kebijakan upah minimum diterapkan atas pertimbangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama kesejahteraan golongan masyarakat miskin. Peningkatan upah minimum diharapkan mampu meningkatkan pendapatan bagi pekerja yang bisa di gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Penerapan Kebijakan upah minimum yang bertujuan untuk mengangkat pendapatan dari pekerja, karena upah yang diterima akan lebih tinggi maka diharapkan rata-rata upah pekerja akan meningkat.

Penerapan kebijakan upah minimum di Indonesia sendiri di terapkan agar menjadi batas minimum bagi perusahaan dalam memberikan upah terhadap pekerja. Diharapkan dengan upah yang meningkat setiap tahun sesuai dengan kebutuhan hidup layak dan berbagai pertimbangan lainnya ikut meningkat sehingga nominal upah terus disesuaikan. Pengaruh dari kebijakan upah minimum sendiri di Indonesia masih menjadi perdebatan, apakah kebijakan upah minimum ini bias mengatasi masalah upah rendah dan mengurangi

pengangguran atau sebaliknya justru dengan upah minimum diterapkan akan membuat kesempatan kerja baik di sektor formal ataupun informal menjadi berkurang dan terjadi pemutusan hubungan kerja yang masif. Selain itu, apakah kebijakan ini bisa mempengaruhi rata-rata upah di pasar tenaga kerja sehingga mengurangi jumlah pengangguran.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia. Salah satu keuntungan yang didapat Indonesia dari banyaknya jumlah penduduk adalah bonus demografi yang merupakan akibat dari besarnya proporsi penduduk usia produktif. Pengertian bonus demografi itu sendiri adalah ledakan penduduk usia produktif yaitu (usia 15 – 64 tahun), dimana tidak semua negara yang ada dunia mengalami kejadian bonus demografi. Indonesia akan mengalami bonus demografi yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2020 – 2035 dimana jumlah usia angkatan kerja (15 – 64 tahun) mencapai sekitar 70%, sedangkan sisanya sebesar 30% adalah penduduk usia tidak produktif (yaitu usia 14 tahun ke bawah dan usia di atas 65 tahun) (BKKBN, 2020).

Bonus demografi ini dapat menjadi sebuah keuntungan besar bagi Indonesia, namun pemerintah harus menyiapkan generasi muda yang berkualitas melalui pendidikan, pelatihan, dan penyediaan lapangan pekerjaan. Apabila tidak mampu menghadapi kehadiran bonus demografi maka yang terjadi ialah ledakan pengangguran usia produktif dan meningkatnya beban pemerintah dalam hal kesejahteraan sosial. Namun demikian, bonus demografi ini juga dapat memunculkan masalah lain yakni bertambahnya jumlah pengangguran.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan mengangkat judul Pengaruh Indikator Makroekonomi, Upah Minimum, dan Demografis terhadap Pengangguran di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pengangguran secara langsung dan tidak langsung melalui investasi dan pertumbuhan ekonomi?
2. Apakah upah minimum berpengaruh terhadap pengangguran secara langsung dan tidak langsung melalui investasi dan pertumbuhan ekonomi?
3. Apakah demografis berpengaruh terhadap pengangguran secara langsung dan tidak langsung melalui investasi dan pertumbuhan ekonomi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan pelaksanaan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pengangguran secara langsung dan tidak langsung melalui investasi dan pertumbuhan ekonomi.
2. Untuk menganalisis pengaruh upah minimum terhadap pengangguran secara langsung dan tidak langsung melalui investasi dan pertumbuhan ekonomi.
3. Untuk menganalisis pengaruh demografis terhadap pengangguran secara langsung dan tidak langsung melalui investasi dan pertumbuhan ekonomi.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

Manfaat penelitian ini bagi akademisi yakni sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan tentang indikator makroekonomi, upah minimum, dan demografis serta pengaruhnya terhadap pengangguran di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini menjadi masukan bagi pihak-pihak penentu kebijakan ekonomi, kependudukan, serta ketenagakerjaan agar dapat mempertimbangkan berbagai aspek dalam mengambil kebijakan untuk mengatasi pengangguran di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1 *Grand Theory*

Penelitian ini mengkaji pertumbuhan ekonomi, investasi, pengeluaran pemerintah sebagai indikator makro ekonomi beserta upah minimum dan demografis serta pengaruhnya terhadap pengangguran di Indonesia. Dengan demikian, Teori Keynes diambil sebagai *grand theory* karena teori ini dapat mencakup semua variabel yang akan dikaji. Keynes pertama kali mengemukakan Teori Keynesian secara resmi pada tahun 1936 dalam bukunya yang berjudul "*The General Theory of Employment, Interest and Money*". Dalam teorinya, Keynes menyatakan bahwa pengangguran yang terjadi di masyarakat disebabkan adanya kekurangan permintaan umum terhadap barang dan jasa, sehingga tingkat upah yang tidak fleksibel dalam pasar tenaga kerja. Dalam keadaan perekonomian yang tidak berkembang, permintaan akan barang dan jasa dalam masyarakat menurun yang mengakibatkan produksi perusahaan juga menurun. Kondisi ini menyebabkan banyak tenaga kerja tidak terpakai yang berakibat pada pengangguran. Menurunnya tingkat produksi akan berdampak pada menurunnya tingkat upah. Dengan adanya defisiensi permintaan agregat maka menyebabkan terjadinya pengangguran (Suhendra dan Wicaksono, 2016).

Keynes menganjurkan adanya campur tangan pemerintah dalam mempertahankan tingkat permintaan agregat untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan adanya lapangan pekerjaan, pendapatan masyarakat akan meningkat dan mendorong daya beli masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi akan terjadi. Penyediaan lapangan kerja dimaksudkan untuk

mempertahankan pendapatan masyarakat agar daya beli masyarakat dapat terjaga dan diharapkan mampu untuk mengatasi pengangguran (Sukirno, 2004).

2.2 Indikator Makroekonomi

Makroekonomi menurut Nanga (2005) merupakan cabang ilmu ekonomi yang menelaah perilaku dari perekonomian atau tingkat kegiatan ekonomi secara keseluruhan (*aggregate*), termasuk di dalamnya faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perekonomian atau kegiatan ekonomi agregat tersebut. Menurut Bakti, dkk (2010) kebijakan makro ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah sebagai keikutsertaan pemerintah dalam memacu kehidupan ekonomi selalu dihadapkan kepada masalah pertumbuhan, inflasi, dan pengangguran sebagai *central issues macroeconomic*. Dengan kata lain bahwa yang menjadi masalah pokok dalam ekonomi makro dan mencakup keseluruhan variabel variabel dalam ekonomi makro adalah masalah pertumbuhan, inflasi dan pengangguran.

Berdasarkan pendapat Nanga (2005) dan Bakti, dkk (2010) dapat disimpulkan bahwa indikator makro ekonomi merupakan statistik yang menunjukkan status ekonomi sebuah negara tergantung pada area tertentu dari ekonomi seperti industri, pasar tenaga kerja, perdagangan, dan lainnya. Indikator dalam makro ekonomi mencakup pertumbuhan, inflasi dan pengangguran.

2.3 Pertumbuhan Ekonomi

2.3.1 Pengertian pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menurut Sukirno (2007) diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu

perekonomian dari suatu periode ke periode lainnya. Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan oleh penambahan faktor-faktor produksi baik dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah barang modal dan teknologi yang digunakan juga makin berkembang. Di samping itu, tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk seiring dengan meningkatnya pendidikan dan keterampilan mereka.

Menurut Untoro (2010) pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Pendapat tersebut menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari Negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya.

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. (Basri dan Munandar, 2010).

2.3.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi tingkat kemiskinan (Moore & Donaldson, 2016). Hal ini dikarenakan ekonomi yang tumbuh akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh berbagai hal. Menurut Sukirno (2007) ada lima faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sebagai berikut:

1. Sumber Daya Alam

Faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya alam atau tanah. Tanah sebagaimana digunakan dalam pertumbuhan ilmu ekonomi mencakup sumber daya alam seperti kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan hutan, mineral, iklim, sumber air, sumber lautan, dan sebagainya. Tersedianya sumber daya alam secara melimpah merupakan hal yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Suatu daerah yang kekurangan sumber alam tidak akan membangun dengan cepat.

2. Organisasi

Organisasi merupakan bagian penting dari proses pertumbuhan. Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi dalam kegiatan ekonomi. Organisasi bersifat melengkapi modal, buruh, dan membantu meningkatkan produktifitas. Dalam ekonomi modern para wiraswastawan tampil sebagai organisator dan pengambil resiko dalam ketidakpastian. Wiraswastawan bukanlah manusia dengan kemampuan biasa. Ia memiliki kemampuan khusus untuk bekerja dibandingkan orang lain. Menurut Schumpeter, seorang wiraswasrawan tidak perlu seorang kapitalis. Fungsi utamanya adalah melakukan pembaharuan (inovasi).

3. Akumulasi Modal

Modal adalah persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat di reproduksi. Apabila stok modal naik dalam batas waktu tertentu, hal ini sering disebut sebagai akumulasi modal atau pembentukan modal. Dalam arti ini, pembentukan modal merupakan investasi dalam bentuk barang-barang modal yang dapat menaikkan stok modal, output nasional, dan pendapatan nasional. Jadi, pembentukan modal merupakan kunci utama meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pembentukan modal diperlukan untuk memenuhi permintaan penduduk di daerah tersebut. Investasi dibidang barang modal tidak hanya meningkatkan produksi tetapi juga membuka kesempatan kerja. Pembentukan modal ini pula yang membawa kearah kemajuan teknologi yang pada akhirnya membawa kearah penghematan dalam produksi skala luas dan juga membawa kearah penggalan sumber alam, industrialisasi dan ekspansi pasar yang diperlukan bagi kemajuab ekonomi.

4. Kemajuan Teknologi

Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan ini berkaitan dengan perubahan dalam metode produksi yang merupakan hasil pembaharuan atau hasil teknik penelitian baru. Perubahan dalam teknologi telah menaikkan produktifitas tenaga kerja, modal dan sektor produksi.

5. Pembagian Kerja dan Skala Produksi

Pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktifitas. Keduanya membawa perekonomian ke arah ekonomi skala besar yang selanjutnya membantu perkembangan industri. Perbaikan kerja menghasilkan perbaikan kemampuan produksi buruh. Setiap buruh menjadi lebih efisien dari sebelumnya.

2.3.3 Produk Domestik Bruto (PDB)

Pengertian Produk Domestik Bruto (PDB) menurut Sukirno (2007), yaitu pendapatan nasional yang menggambarkan tingkat produksi negara yang dicapai dalam satu tahun tertentu dan perubahannya dari tahun ke tahun. Karenanya PDB mempunyai peranan penting dalam menggambarkan tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai, dan perubahan pertumbuhannya dari tahun ke tahun. PDB menurut Eachern (2000) merupakan pengukuran nilai pasar dari barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh sumber daya yang berada dalam suatu negara selama jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. GDP juga dapat digunakan untuk mempelajari perekonomian dari waktu ke waktu atau untuk membandingkan beberapa perekonomian pada suatu saat.

Indikator yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah tingkat Produk Domestik Bruto (PDB). Beberapa alasan digunakannya PDB sebagai indikator pengukuran pertumbuhan ekonomi menurut Arifin dan Hadi (2009), sebagai berikut:

1. PDB dihitung berdasarkan jumlah nilai tambah (*value added*) yang dihasilkan seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian. Hal ini, peningkatan PDB mencerminkan peningkatan balas jasa kepada faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi.
2. PDB dihitung atas dasar konsep siklus aliran (*circulair flow concept*). Artinya, perhitungan PDB mencakup nilai produk yang dihasilkan pada suatu periode tertentu. Perhitungan ini tidak mencakup perhitungan pada periode sebelumnya. Pemanfaatan konsep aliran dalam menghitung PDB memungkinkan seseorang untuk membandingkan jumlah output pada tahun ini dengan tahun sebelumnya.

3. Batas wilayah perhitungan PDB adalah Negara (perekonomian domestik). Hal ini memungkinkan untuk mengukur sampai sejauh mana kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah maupun mendorong aktivitas perekonomian domestik.

Berdasarkan pengertian Sukirno (2007) dan Eachern (2000) dapat disimpulkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) adalah pendapatan total dan pengeluaran total nasional atas output barang dan jasa dalam periode tertentu. PDB ini dapat mencerminkan kinerja ekonomi, sehingga semakin tinggi PDB sebuah negara dapat dikatakan semakin bagus pula kinerja ekonomi di negara tersebut.

2.4 Investasi

2.4.1 Pengertian investasi

Tendelilin (2001) mengemukakan bahwa investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang. Sementara Ahmad (2014) mengartikan investasi sebagai menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut.

Istilah investasi bisa berkaitan dengan berbagai macam aktivitas. Menginvestasikan dana pada sektor riil (tanah, emas, mesin atau bangunan) maupun aset finansial (deposito, saham atau obligasi), merupakan aktifitas yang umum di lakukan. Seseorang dikatakan sebagai investor bilamana yang bersangkutan bersedia untuk tidak mengkonsumsi hari ini atas sesuatu dengan maksud untuk memperoleh tingkat konsumsi yang lebih tinggi (baik) dimasa mendatang. Investasi dapat didefinisikan sebagai penundaan konsumsi sekarang

untuk digunakan dalam produksi yang efisien selama periode waktu tertentu (Jogiyanto, 2003).

Berdasarkan pendapat Tendelilin (2001), Ahmad (2014), dan (Jogiyanto, 2003) dapat disimpulkan bahwa investasi merupakan pengorbanan yang dilakukan pada hari ini untuk memperoleh manfaat lebih baik di waktu yang akan datang. Investasi merupakan persiapan keuangan dengan penanaman modal dengan membeli suatu bentuk produk yang bukan untuk dikonsumsi dengan harapan mendapatkan keuntungan dimasa depan.

2.4.2 Jenis-jenis investasi

Investasi pada umumnya dikategorikan dua jenis yaitu, *real assets* dan *financial assets*. Asset riil adalah bersifat berwujud seperti gedung-gedung, kendaraan dan sebagainya. Sedangkan aset keuangan merupakan dokumen (surat-surat) klaim tidak langsung memegangnya terhadap aktiva riil pihak yang menerbitkan sekuritas tersebut (Gumanti, 2011).

Investasi sangat bergantung pada kondisi domestik dalam sebuah negara (Forte, 2013). Investasi, baik dalam dan luar negeri, akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara (Dondeti and Mohanty, 2007). Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, membagi penanaman modal menjadi 2 yaitu penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN).

a. Penanaman Modal Asing (PMA)

PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Investasi Asing merupakan investasi yang

dilaksanakan oleh pemilik-pemilik modal asing didalam Negara kita untuk mendapatkan suatu keuntungan dari usaha yang dilaksanakan itu. Investasi asing ini dapat berupa investasi langsung (*foreign direct investment*) atau investasi portofolio yaitu melalui pembelian saham perusahaan didalam negara (Indonesia). Keuntungan dari adanya investasi asing bagi kita ialah berupa diolahnya sumber daya alam kita, meningkatnya lapangan kerja dan terjadinya nilai tambah (*added value*), meningkatnya penerimaan negara dari sumber pajak, serta adanya alih teknologi. Bagi pemilik modal asing, keuntungan mereka berupa aliran dividen dari hasil usaha itu dari negeri dimana modal itu ditanamkan ke negara dari mana modal itu berasal (Irawan, 2002).

b. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam Negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Penanam modal Dalam Negeri dapat dilakukan oleh perseorangan WNI, badan usaha Negeri, dan/atau pemerintah negeri yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan (Salim dan Sutrisno, 2008). Menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut (Rachbini, 2008).

Jogiyanto (2003) mengklasifikasikan aktivitas investasi ke dalam dua tipe yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung. Klasifikasi investasi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Investasi Langsung

Investasi langsung dapat dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang dapat diperjual-belikan di pasar uang (*money market*), pasar modal (*capital market*), atau pasar turunan (*derivative market*). Aktiva keuangan yang dapat diperjual-belikan di pasar uang hanya aktiva yang mempunyai tingkat risiko kecil, jatuh tempo yang pendek dengan tingkat likuiditas yang tinggi.

Aktiva keuangan yang diperjualbelikan di pasar modal memiliki sifat investasi jangka panjang berupa saham-saham (*equity securities*) dan surat-surat berharga pendapatan tetap (*fixed income securities*). Opsi dan *future contract* merupakan surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar turunan (*derivative market*). Investasi langsung tidak hanya dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang dapat diperjual-belikan, namun juga dapat dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang tidak dapat diperjualbelikan seperti: tabungan, giro, dan sertifikat deposito.

b. Investasi Tidak Langsung

Investasi tidak langsung dilakukan dengan membeli surat-surat berharga di perusahaan investasi. Perusahaan investasi adalah perusahaan yang menyediakan jasa-jasa keuangan dengan cara menjual sahamnya ke publik. Investasi melalui perusahaan investasi menawarkan keuntungan tersendiri bagi investor. Hanya dengan modal yang relatif kecil, investor dapat mengambil keuntungan karena pembentukan portofolio investasinya. Selain itu, dengan membeli saham perusahaan investasi, investor tidak membutuhkan pengetahuan dan pengalaman yang tinggi. Dengan pembelian tersebut investor dapat membentuk portofolio yang optimal.

Halim (2005) mengklasifikasikan investasi dalam dua bentuk, yaitu: investasi pada aset-aset riil (*real assets*) dan investasi pada aset-aset finansial (*financial assets*). Investasi pada aset-aset riil dapat berbentuk pembelian asset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, perkebunan, dan lain-lain, sedangkan investasi dalam bentuk *financial assets* dapat dilakukan antara lain dalam bentuk investasi di pasar uang, seperti: sertifikat deposito, *commercial paper*, surat berharga pasar uang, dan lainnya. Investasi dapat dilakukan di pasar modal, misalnya obligasi, waran, reksadana, opsi, *futures*, saham, dan lain-lain.

2.4.3 Tujuan investasi

Investasi dilakukan untuk mendapatkan sejumlah keuntungan. Ada beberapa tujuan seseorang melakukan investasi yang dikemukakan oleh Tendelilin (2001), yaitu:

- a. Mendapatkan kehidupan yang lebih layak dimasa yang akan datang seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana cara meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya bagaimana berusaha untuk mempertahankan tingkat pendapatan yang ada sekarang agar tidak berkurang dimasa yang akan datang.
- b. Mengurangi tekanan inflasi, dengan melakukan investasi dalam memilih perusahaan atau objek lain, seseorang dapat menghindarkan diri agar kekayaan atau harta miliknya tidak merosot nilainya karena digerogeti oleh tingkat inflasi.
- c. Dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa Negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang sifatnya mendorong tumbuhnya investasi di

masyarakat melalui fasilitas perpajakan yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tertentu.

Ada banyak sarana yang dapat digunakan untuk investasi baik dalam bentuk deposito, saham, dan lain-lain. Pada dasarnya kegiatan investasi adalah berkaitan dengan *risk and return*. Semakin besar *return* yang dijanjikan dari suatu instrument, maka semakin tinggi pula *risk* yang mengikuti *return* tersebut (Dumairy, 2005).

2.5 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah (Government Expenditure) adalah pengeluaran oleh pemerintah untuk membeli barang dan jasa. Sebagian dari pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintahan atau pengeluaran rutin dan sebagian lainnya untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan atau pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin pemerintah terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, angsuran pinjaman/hutang dan bunga, ganjaran subsidi dan sumbangan pada daerah, pensiun dan bantuan, pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain, dan pengeluaran tak terduga. Pengeluaran Pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah (Sukirno, 2004).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pengeluaran pemerintah Indonesia secara garis besar dikelompokkan ke dalam dua golongan (Dumairy, 2005) sebagai berikut:

a. Pengeluaran rutin

Pengeluaran rutin adalah pengeluaran yang secara rutin setiap tahunnya dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan dan pemeliharaan roda pemerintahan, yang terdiri dari belanja pegawai yaitu untuk pembayaran gaji pegawai termasuk gaji pokok dan tunjangan, belanja barang, yaitu untuk pembelian barang-barang yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah sehari-hari, subsidi, pembayaran angsuran dan bunga utang negara, belanja pemeliharaan yaitu pengeluaran untuk memelihara agar milik atau kekayaan pemerintah tetap terpelihara secara baik dan belanja perjalanan yaitu untuk perjalanan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan.

b. Pengeluaran pembangunan

Pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk pembangunan fisik dan non fisik dalam rangka menambah modal masyarakat. Contoh pembangunan fisik adalah pembangunan jalan, jembatan, sekolah dan ruman sakit. Sedangkan pembangunan non fisik seperti pelaksanaan program pengentasan kemiskinan.

Pengeluaran pemerintah berperan untuk mempertemukan permintaan masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang tidak dapat dipenuhi oleh pihak swasta. Beberapa sektor perekonomian yang terpengaruh dalam pengeluaran pemerintah (Rahayu, 2010), yakni:

a. Produksi

Pengeluaran negara, secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi sektor produksi. Pengeluaran pemerintah dapat dikatakan sebagai faktor produksi, karena pengeluaran pemerintah dapat menunjang tersedianya faktor-faktor produksi seperti, modal, tenaga kerja, dan manajemen.

John Due menyebutkan bahwa pemerintah dapat mempengaruhi tingkat GNP (*Gross National Product*) nyata dengan mengubah persediaan berbagai faktor yang dipakai dalam produksi, melalui program-program pengeluaran.

b. Distribusi

Secara langsung atau tidak langsung pengeluaran Negara berpengaruh terhadap distribusi barang dan jasa. Subsidi yang akan dikeluarkan pemerintah untuk barang atau jasa akan mempermudah masyarakat yang berdaya beli rendah menjadi mudah untuk memperoleh barang dan jasa tertentu.

c. Konsumsi

Pengeluaran dapat mengubah atau memperbaiki pola dan tingkat konsumen masyarakat terhadap barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah maupun mekanisme pasar. Pemerintah akan mengalokasikan kembali sumber ekonomi dari berbagai barang atau jasa dengan memproduksi barang atau jasa yang mengandung keuntungan eksternal. Kegiatan ini mengubah alokasi sumber ekonomi karena masing-masing pemberi dan penerima mempunyai pola pengeluaran yang berlainan. Pajak yang dipakai untuk membiayai kegiatan tersebut dapat mengakibatkan realokasi dari sumber ekonomi.

d. Keseimbangan perekonomian

Pemerintah dapat memperbaiki dan memelihara keseimbangan perekonomian dan meningkatkan pendapatan nasionalnya melalui target peningkatan PDB. Kebijakan fiskalnya dapat berupa kebijakan surplus anggaran, defisit anggaran, kompensasi, investasi umum tergantung pada situasi ekonomi yang dihadapi. Program pengeluaran serta pembiayaan akan dapat mempengaruhi tingkat pencapaian *full-employment* dengan mengubah

pengeluaran total dalam perekonomian, dan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi.

Pengeluaran pemerintah yang dinyatakan dalam belanja pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam proyek yang mengacu pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, peningkatan kesejahteraan, dan program yang menyentuh langsung kawasan yang terbelakang. Wagner (Putri dan Cahyono, 2012) mengemukakan bahwa dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat secara relatif pengeluaran pemerintah juga akan meningkat. Dengan tumbuhnya perekonomian hubungan antara industri, hubungan industri dengan masyarakat dan sebagainya menjadi semakin rumit.

2.6 Upah Minimum

Sumarsono (2003) mengemukakan bahwa upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, baik untuk karyawan itu sendiri maupun untuk keluarganya.

Adapun tujuan ditetapkannya upah minimum menurut Asyhadie (2007) yaitu: 1) untuk menonjolkan arti dan peranan pekerja/buruh sebagai subsistem dalam suatu hubungan kerja, 2) Untuk melindungi kelompok kerja dari adanya sistem pengupahan yang sangat rendah dan yang secara materiil kurang memuaskan, 3) Untuk mendorong kemungkinan diberikannya upah yang sesuai dengan nilai pekerjaan yang dilakukan, 4) Untuk mengusahakan terjaminnya

ketenangan dan kedamaian kerja dalam perusahaan, dan 5) Mengusahakan adanya dorongan peningkatan dalam standar hidup secara normal.

Pemerintah menetapkan upah yang harus dibayar oleh perusahaan kepada para pekerja, upah ini diberi nama upah minimum. Bagi sebagian pekerja, upah minimum ini tidak berpengaruh karena mereka sudah menikmati upah di atas upah minimum. Bagi sebagian lainnya, terutama yang tidak terdidik dan tidak berpengalaman hal ini berpengaruh, karena upah minimum mengurangi jumlah tenaga kerja yang diminta oleh perusahaan sehingga berpotensi meningkatkan pengangguran (Mankiw, 2006).

Upah yang diberikan oleh seorang pekerja tergantung pada kemampuan pekerja tersebut dalam memproduksi barang dan jasa. Semakin produktif seorang pekerja maka akan semakin besar upahnya, begitu pula sebaliknya semakin rendah produktivitas seorang pekerja maka akan semakin kecil upah yang dihasilkannya. Upah minimum menurut Husni (2000) terdiri atas:

1. Upah minimum Provinsi, yaitu upah minimum yang berlaku untuk seluruh Kabupaten/Kota di satu provinsi
2. Upah minimum Kabupaten/Kota, yaitu upah minimum yang berlaku di Daerah Kabupaten/Kota
3. Upah minimum sektoral Provinsi (UMS Provinsi), yaitu upah minimum yang berlaku secara sektoral di daerah Kabupaten/Kota di satu Provinsi
4. Upah minimum sektoral Kabupaten/Kota (UMS Kabupaten/Kota), yaitu upah minimum yang berlaku secara sektoral di daerah Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan upah minimum menurut Djumaldi (2010) bagi pekerja/buruh yang berstatus tidak tetap, maupun dalam masa percobaan, upah diberikan oleh pengusaha serendah-rendahnya sebesar upah minimum. Selanjutnya upah

minimum hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari satu tahun. Peninjauan besarnya upah pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun dilakukan atas dasar kesepakatan antara pekerja/serikat pekerja dengan pengusaha. Sementara bagi pekerja dengan sistem kerja borongan, atau berdasarkan satuan hasil yang dilaksanakan satu bulan atau lebih, upah rata-rata sebulan serendah-rendahnya sebesar upah minimum di perusahaan. Upah pekerja harian lepas ditetapkan secara upah bulanan yang dibayarkan berdasarkan jumlah hari kehadiran dengan perhitungan upah sehari: a) bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 6 hari dalam seminggu, upah bulanan dibagi 25 (dua puluh lima) dan b) bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 5 hari dalam seminggu, upah bulanan dibagi 21 (dua puluh satu).

Upah minimum memiliki dampak terbesar dalam pengangguran usia muda. Upah ekuilibrium para pekerja usia muda cenderung rendah karena dua alasan. Pertama, karena para pekerja usia muda termasuk anggota angkatan kerja yang kurang terdidik dan kurang berpengalaman, mereka cenderung memiliki produktivitas marjinal yang rendah. Kedua, para pemuda seringkali mengambil sebagian dari kompensasi mereka dalam bentuk *on the job training* daripada bayaran langsung. Karena itu dalam angkatan kerja, upah sering kali berpengaruh pada para pemuda daripada yang lainnya (Mankiw, 2006).

2.7 Demografis

Demografi menurut Hauser dan Duncan (Adioetomo dan Samosir, 2013) adalah ilmu yang mempelajari jumlah, persebaran, teritorial, dan komposisi penduduk serta perubahan-perubahannya dan sebab-sebab perubahan itu, yang biasanya timbul karena natalitas (fertilitas), mortalitas, dan gerak teritorial (migrasi). Demografi sangat erat kaitannya dengan penduduk usia kerja dan

jumlah populasi dalam suatu wilayah (Prskawetz & Sambt, 2014). Demografi menurut Adioetomo dan Moertiningsih (2005) mencakup berbagai hal seperti jumlah, persentase kenaikan, jenis kelamin, umur, pekerjaan, kesehatan, angka kelahiran, gaya hidup, perkawinan dan lain-lain hal tentang pendudukan.

Menurut Adioetomo dan Samosir (2013) demografi dipengaruhi oleh fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Demografi mempelajari persoalan dan keadaan perubahan-perubahan penduduk atau segala hal yang berhubungan dengan komponen-komponen perubahan, sehingga menghasilkan suatu keadaan dan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Demografi menghasilkan teknik-teknik untuk menghitung data kependudukan. Dengan teknik tersebut dapat diperoleh perkiraan keadaan penduduk di masa depan atau di masa lampau.

Fertilitas adalah sama dengan kelahiran hidup (*live birth*), yaitu terlepasnya bayi dari rahim seorang perempuan dengan ada tanda-tanda kehidupan; misalnya berteriak, bernafas, jantung berdenyut, dan sebagainya. Pengukuran fertilitas lebih kompleks dibandingkan dengan pengukuran mortalitas, karena seorang perempuan hanya meninggal satu kali, tetapi ia dapat melahirkan lebih dari seorang bayi (Mantra, 2000).

Terdapat tiga konsep mengenai kelahiran. Pertama, lahir hidup (*live birth*), adalah kelahiran seorang bayi tanpa memperhitungkan lamanya di dalam kandungan, di mana si bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan. Kedua adalah lahir mati, kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan. Konsep terakhir adalah aborsi, peristiwa kematian bayi

dalam kandungan dengan umur kurang dari 28 minggu baik secara sengaja maupun tidak disengaja (Adioetomo dan Samosir, 2013).

Menurut Suandi (2010), fertilitas merupakan bagian dari sistem yang sangat kompleks dalam sosial, biologi, dan interaksinya dengan faktor lingkungan. Dalam penentuan tinggi rendahnya tingkat fertilitas seseorang, keputusan diambil oleh istri atau suami-istri atau secara luas oleh keluarga. Penentuan keputusan ini dapat dipengaruhi oleh latar belakang dan lingkungan, misalnya pendidikan, pendapatan, pekerjaan, norma keluarga besar umur perkawinan, dan sebagainya. Jumlah anak dari seorang wanita dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk tingkat pendidikan (menyebabkan penundaan perkawinan), umur kawin pertama, keinginan membatasi jumlah anak, dan penggunaan kontrasepsi. Oleh karena itu, perbedaan-perbedaan fertilitas antar masyarakat maupun antar waktu dari suatu masyarakat baru dapat diketahui atau dipahami apabila telah memahami beragam faktor yang secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi dengan fertilitas.

Kematian merupakan kondisi hilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen, yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Lahir hidup yaitu peristiwa keluarnya hasil konsepsi dari rahim seorang ibu secara lengkap tanpa memandang lamanya kehamilan dan setelah perpisahan tersebut terjadi, hasil konsepsi bernafas dan mempunyai tanda-tanda hidup lainnya, seperti denyut jantung, denyut tali pusat, atau gerakan-gerakan otot, tanpa memandang apakah tali pusat sudah dipotong atau belum. Lahir mati adalah peristiwa menghilangnya tanda-tanda kehidupan dari hasil konsepsi sebelum hasil konsepsi tersebut dikeluarkan dari rahim ibunya (Suandi, 2010).

Peninjauan migrasi secara regional sangat penting untuk ditelaah secara khusus mengingat adanya kepadatan (*densitas*) dan distribusi penduduk yang tidak merata, adanya faktor-faktor pendorong dan penarik bagi orang-orang untuk melakukan migrasi, adanya desentralisasi dalam pembangunan, di sisi lain pihak komunikasi termasuk transportasi semakin lancar. Migrasi sering diartikan sebagai perpindahan penduduk yang relatif permanen dari suatu daerah ke daerah lain (Mantra, 2000).

2.8 Pengangguran

2.8.1 Pengertian pengangguran

Pengangguran menurut Mankiw (2006) adalah masalah makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan masalah yang paling berat. Bagi kebanyakan orang, kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan tekanan psikologis. Pengangguran dapat dicegah dengan sisi penawaran dan mekanisme harga di pasar bebas yang dapat menjamin terciptanya permintaan yang menyerap semua penawaran (supply). Pengangguran dapat pula terjadi dikarenakan alokasi sumber daya yang kurang tepat (Gilarso, 2004).

Muminin dan Hidayat (2017) mengemukakan bahwa pertumbuhan penduduk menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya tingkat pengangguran disuatu wilayah. Pada usia produktif populasi penduduk dalam jumlah besar dapat meningkatkan output produksi atau dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi disuatu wilayahnya. Dengan populasi yang semakin tinggi akan menyebabkan pengangguran dan pengangguran yang tidak teratasi akan mengakibatkan kemiskinan pada wilayah tersebut. Dalam teori bonus demografi bahwa suatu wilayah akan menjadikan bsarnya populasi penduduk sebagai

kekuatan dari wilayahnya ketika rata-rata usia populasi tersebut di usia 15-24 tahun, dikarenakan pada usia produktif akan meningkatkan output produksi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Malthus (Mulyadi, 2014) menyatakan bahwa manusia berkembang jauh lebih cepat dibandingkan produksi hasil-hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia berkembang sesuai dengan deret ukur (*geometric progression*, dari 2 ke 4,8,16,32 dan seterusnya), sedangkan pertumbuhan produksi makanan hanya meningkat sesuai dengan deret hitung (*arithmetic progression*, dari 2 ke 4,6,8 dan seterusnya).

Pendapat Malthus tersebut menyatakan bahwa penduduk cenderung bertambah secara tak terbatas sampai mencapai batas persediaan makanan, dan permasalahan ini menimbulkan manusia saling bersaing dengan adanya persaingan ini maka akan ada manusia yang tersisih dan tidak mampu memperoleh makanan. Penjelasan tersebut bisa diartikan semakin banyaknya jumlah penduduk maka akan terciptanya angkatan kerja yang semakin banyak pula, dan hal ini tak diimbangi dengan kesempatan kerja yang tersedia. Dikarenakan jumlah kesempatan kerja yang tersedia sedikit maka angkatan kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan akan menjadi pengangguran (Mulyadi, 2014).

2.8.2 Bentuk-bentuk pengangguran

Pengangguran terjadi karena ketidaksesuaian antara permintaan dan penyediaan dalam pasar kerja. Bentuk-bentuk pengangguran menurut Sumarsono (2009) yaitu:

1. Pengangguran friksional

Pengangguran friksional adalah pengangguran yang terjadi karena kesulitan temporer dalam mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja yang

ada. Kesulitan temporer ini dapat berbentuk: a) tenggang waktu yang diperlukan selama proses/prosedur pelamaran dan seleksi, atau terjadi karena faktor jarak atau kurangnya informasi; b) kurangnya mobilitas pencari kerja dimana lowongan pekerja justru terdapat bukan disekitar tempat tinggal si pencari kerja; c) pencari kerja tidak mengetahui dimana tersedianya tenaga-tenaga yang sesuai. Pengangguran ini terhambat dikarenakan proses permintaan dan penawaran tenaga kerja tidak lancar, penyebab hambatan ini ada dua yaitu tempat dan waktu.

2. Pengangguran musiman

Pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi karena pergantian musim. Diluar musim panen dan turun kesawah, banyak orang yang tidak mempunyai kegiatan ekonomis, mereka hanya sekedar menunggu musim yang baru. Selama masa menunggu mereka tergolong sebagai pengangguran musiman. Kegiatan ekonomi masyarakat seringkali terpengaruh oleh irama musim. Ada musim giat sehingga banyak permintaan tenaga kerja dan ada masa-masa dimana kegiatan mengendur. Pergantian antara musim giat dan musim kendur terjadi secara teratur dalam periode satu tahun, selama kegiatan mengendur terjadi pengangguran yang akan terpecahkan secara otomatis bisa tiba masa giat kembali.

3. Pengangguran siklikal

Gejala ekonomi mengikuti perilaku alam bahkan gejala biologis. Seperti halnya banjir merupakan gejala alam. Demikian pula dengan kegiatan ekonomi, ada saatnya terjadi ekspansi kegiatan meningkat, atau timbul kejenuhan dan penurunan kegiatan. Setelah itu diikuti kenaikan intensitas kegiatan lain. Pada masa ekspansi seseorang lebih optimisme, dalam situasi ini dampak bagi

kesempatan kerja positif. Kenaikan permintaan tenaga kerja akan mengurangi pengangguran begitupun sebaliknya. Hal ini terekam oleh naiknya tingkat pengangguran.

4. Pengangguran struktural

Pengangguran struktural adalah pengangguran yang terjadi karena erubahan dalam struktur atau komposisi perekonomian. Perubahan struktur yang demikian memerlukan perubahan dalam keterampilan tenaga kerja yang dibutuhkan, sedangkan pihak pencari kerja tidak mampu menyesuaikan diri dengan keterampilan baru tersebut. Salah satu kemajuan ekonomi adalah terjadinya perubahan dominasi eranan ekonomi yang dimainkan oleh setiap sektor dalam kegiatan produksi maupun dalam pemberian kesempatan kerja.

5. Pengangguran teknologis

Pertumbuhan industri mendorong penggunaan teknologi yang dipakai dalam proses produksi. Perubahan teknologi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Perubahan teknologi produksi membawa dampak kesempatan kerja keberbagai arah. Kekuatan substitutif merombak spesifikasi jabatan yang ditimbulkan membawa dampak negatif bagi kesempatan kerja berupa pengangguran.

6. Pengangguran karena kurangnya perminataan agregat

Permintaan total masyarakat merupakan dasar untuk diadakannya kegiatan investasi. Pengeluaran investasi memberikan peluang untuk tumbuh kesempatan kerja. Bila permintaan terhadap barang dan jasa menurun, maka timbulah penurunan pada permintaan tenaga kerja. Kurangnya permintaan agregat diartikan sebagai mendasar bukan sementara bulanan atau sementara tahunan, tetapi merupakan kondisi yang berlaku dalam jangka panjang. Profil

yang perlu diketahui adalah tempat terjadinya pengangguran menurut pendidikan yang perlu diketahui pengangguran tidak terdidik atau berpendidikan rendah dapat lebih mudah ditangani karena kesempatan kerja bagi tenaga berketerampilan mudah lebih besar, sehingga kemungkinan untuk memperoleh pekerjaan lebih besar.

2.8.3 Pengangguran berdasarkan cirinya

Menurut (Sukirno, 2007) berdasarkan cirinya, pengangguran dibagi ke dalam empat kelompok:

1. Pengangguran terbuka

Pengangguran terbuka terjadi dikarenakan lowongan pekerjaan yang lebih rendah/sedikit dari pertumbuhan tenaga kerja. Permasalahan tersebut mengakibatkan erekonomian semakn banyak jumlah tenaga kerja yang tidak bias terserap oleh lapangan pekerjaan yang ada. Dampak dari permasalahan ini dalam jangka panjang mereka tidak melakukan suatu pekerjaan yang mengakibatkan mereka menganggur secara nyata dan separuh waktu, oleh karena itu permasalahan seperti ini disebut pengangguran terbuka. Kegiatan ekonomi yang menurun juga dapat mengakibatkan pengangguran terbuka atau kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja akibat dari kemunduran perkembangan suatu industri.

2. Pengangguran tersembunyi

Pengangguran tersembunyi dominan ke sektor pertanian dan jasa. Setiap kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja dan jumlah tenaga kerja yang digunakan tergantung kepada banyak nya faktor, salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan adalah besar kecilnya suatu perusahaan, jenis perusahaan, mesin yang digunakandan tingkat produksi yang dihasilkan. Di negara

berkembang banyak ditemukan jumlah tenaga kerja yang lebih banyak dari tenaga kerja yang diperukan. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan disebut dengan pengangguran tersembunyi.

3. Pengangguran bermusim

Pengangguran bermusim terjadi lebih banyak disektor pertanian dan perikanan. Pada musim tertentu saja para petani dan nelayan melakukan pekerjaan dan mendapatkan penghasilan. Pada musim hujan petani dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan, sedangkan pada musim kemarau para petani tidak dapat menggarap tanahnya. Saat para petani dan nelayan tidak melakukan pekerjaan maka mereka termasuk menganggur.

4. Setengah menganggur

Migrasi dari desa ke kota sangat pesat yang menyebabkan tidak semua orang yang berpindah ke kota mendapatkan pekerjaan. Sebagian akan menjadi pengangguran sepenuh waktu. Disamping itu ada yang tidak menganggur, tetapi tidak bekerja sepenuh waktu, dan jam kerja mereka jauh lebih sedikit dari yang normal. Diasumsikan mereka hanya bekerja satu hingga dua minggu dalam sebulan atau hanya empat jam dalam sehari.

2.9 Hubungan Antar Variabel

2.9.1 Hubungan pengeluaran pemerintah, investasi, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran

Pengeluaran pemerintah merupakan anggaran yang disediakan untuk melaksanakan berbagai program di berbagai bidang. Pengeluaran pemerintah harus mampu mencapai beberapa sasaran, seperti peningkatan produktivitas kerja aparatur pemerintah, perluasan jangkauan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan

pembangunan serta terpeliharanya berbagai aset negara dan hasil-hasil pembangunan. Apabila pemerintah mengoptimalkan belanja pemerintah untuk kegiatan-kegiatan yang produktif maka akan berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah (Kaharuddin, dkk, 2019).

Investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja. Semakin tinggi tingkat investasi maka lapangan kerja akan semakin terbuka sehingga dapat menyerap banyak tenaga kerja. Semakin tinggi tingkat investasi, tingkat pengangguran akan menurun (Kurniawan, 2011). Naiknya investasi dapat menyebabkan pengangguran menurun karena disaat terjadinya kenaikan tingkat investasi, maka akan banyak terdapat industri atau perusahaan. Dengan banyaknya terdapat industri dan perusahaan akibat terjadinya kenaikan tingkat investasi, maka akan banyak menyerap tenaga kerja karena investasi berorientasi pada padat karya (Putra, 2018).

Produk Domestik Bruto (PDB) mempunyai pengaruh terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan asumsi apabila PDB mengalami peningkatan, maka jumlah nilai tambah output dalam seluruh unit ekonomi akan meningkat sehingga terjadi peningkatan terhadap jumlah penyerapan tenaga kerja yang diminta atau berorientasi pada padat karya (Sukirno, 2004).

Masalah pengangguran merupakan bagian yang terpenting dalam mengukur pembangunan ekonomi, alasannya karena dengan naiknya angka pengangguran terbuka maka akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah dimana tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan sebagai landasan pengukuran bagi tingkat pengangguran terbuka di daerah. Dimana

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perkembangan tersebut selalu dinyatakan dalam bentuk persentase perubahan pendapat nasional pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Hasan, 2018).

2.9.2 Hubungan upah minimum, investasi, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran

Kebijakan upah minimum ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Perusahaan yang memiliki kemampuan untuk menentukan harga dari tenaga kerjanya membuat pasar tenaga kerja tidak lagi menjadi bersifat persaingan sempurna, namun sudah berubah menjadi pasar monopsoni. Saat perusahaan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi harga tenaga kerjanya maka disitulah mereka akan menekan harga tenaga kerjanya apalagi jumlah tenaga kerja yang tersedia melimpah. Oleh karena itu, pemerintah mempromosikan kebijakan upah minimum untuk melindungi tenaga kerja dari upah yang tidak layak (Pamungkas dan Suman, 2017).

Effendy (2019) mengemukakan bahwa peningkatan upah minimum yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja akan meningkatkan konsumsi dan tabungan rumah tangga. Tingkat upah yang baik akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah hendaknya menerapkan kebijakan penerapan upah yang sesuai dengan kebutuhan hidup layak pekerja. Selain itu, peningkatan upah minimum akan menarik minat pencari kerja. Semakin banyak orang yang mencari kerja maka tingkat pengangguran kemungkinan akan berkurang.

Tingkat upah memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap pengangguran, dikarenakan upah minimum diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja, agar sampai pada tingkat pendapatan "*living wage*" yang berarti bahwa orang bekerja akan mendapat pendapatan yang layak untuk hidupnya. Upah minimum dapat mencegah pekerja dalam eksploitasi tenaga kerja. Upah minimum dapat meningkatkan produktifitss tenaga kerja dan mengurangi konsekuensi pengangguran seperti yang diperkirakan teori ekonomi konvensional (Effendy, 2019).

Investasi dan tingkat upah merupakan salah satu faktor yang penting untuk meningkatkan kesempatan kerja. Dengan investasi yang ada maka akan adanya penambahan barang-barang modal yang dapat menyerap tenaga kerja. Karena alat-alat yang digunakan juga memerlukan tenaga kerja untuk mengoperasikannya sehingga kesempatan kerja akan meningkat (Rahmawati, 2013).

Pengangguran dapat dikurangi apabila perusahaan menginvestasikan modalnya untuk memperluas perusahaan. Dengan menambah luas ukuran perusahaan maka jumlah pekerja yang sudah dipekerjakan oleh perusahaan akan kurang. Dalam melakukan proses produksi dimana perusahaan yang baru saja menambah luas ukuran perusahaannya akan memerlukan tambahan tenaga kerja yang dipekerjakan. Dengan demikian permintaan tenaga kerja akan meningkat dan juga dapat mengurangi pengangguran. (Mahayana dan Sukadana, 2014).

2.9.3 Hubungan demografis, investasi, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran

Bertambahnya jumlah penduduk secara absolut akan berdampak ada bertambahnya jumlah angkatan kerja. Dengan populasi yang semakin tinggi akan menyebabkan pengangguran karena tidak semua populasi dapat diserap dalam dunia kerja. Pengangguran yang tidak teratasi akan mengakibatkan kemiskinan pada wilayah tersebut. Jika Indonesia tidak mampu melakukan antisipasi terhadap peningkatan populasi yang begitu cepat maka akan berpengaruh negatif terhadap kualitas hidup dan memperlambat pertumbuhan ekonomi di negaranya (Guga, et.al, 2015).

Laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol akan berdampak pada ekonomi secara luas. Namun demikian, pengaturan akan laju pertumbuhan penduduk bukanlah perkara yang mudah seperti Indonesia yang mengalakkan program keluarga berencana namun masih belum mampu mengontrol/mengurangi laju pertumbuhan penduduknya. Pengontrolan laju pertumbuhan penduduk justru menimbulkan persoalan baru dimana akan tingginya jumlah penduduk usia tua. Semakin banyak usia tua dalam sebuah populasi secara signifikan dapat merusak potensi pertumbuhan ekonomi (Choi & Shin, 2015).

Kondisi demografis akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Suatu wilayah akan menjadikan besarnya populasi penduduk sebagai kekuatan dari wilayahnya ketika rata-rata usia populasi tersebut di usia 15-24 tahun, dikarenakan penduduknya berada pada usia produktif akan meningkatkan output produksi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan jumlah

pengangguran yang sedikit atau berkurang maka perekonomian suatu negara akan meningkat (Muminin dan Hidayat, 2017).

Jumlah penduduk yang terus bertambah mendorong perlunya penyediaan lapangan kerja yang lebih banyak agar tidak terjadi tingkat pengangguran yang tinggi. Jika lapangan kerja tidak dapat terpenuhi yang akan terjadi adalah kebalikan dari bonus demografi (*demographic dividend*) yaitu beban demografi (*demographic burden*). Dimana banyaknya jumlah penduduk produktif yang tidak dapat terserap oleh pasar kerja akan menjadi beban ekonomi sebuah negara. Pada kondisi ini tingkat pengangguran akan tinggi, sehingga penduduk usia kerja yang tidak memiliki pekerjaan akan menjadi beban bagi penduduk yang bekerja (Yusmarni, 2016).

Demografi memiliki hubungan yang sangat erat dengan pengangguran sebagaimana dikemukakan oleh Chen, et.al. (2016) dan Ali, et.al (2013) dari hasil kajiannya bahwa pertumbuhan penduduk akan berdampak pada tinggi rendahnya tingkat pengangguran. Tingginya populasi penduduk akan menjadi beban bagi masing-masing daerah karena lapangan pekerjaan yang semakin terbatas dan tidak mengimbangi jumlah penduduk yang semakin bertambah. Dengan bertambahnya jumlah penduduk usia produktif yang tidak diimbangi dengan lapangan kerja akan menimbulkan pengangguran di berbagai tempat.

Setiap negara terus berupaya untuk mengatasi pengangguran dengan berbagai kebijakan seperti dengan meningkatkan investasi. Karena keperluan investasi tidak bisa dipenuhi dari dalam negeri akibat rendahnya jumlah tabungan dalam negeri, maka sebagai alternatifnya diperlukan investasi asing (PMA) yang dapat berupa investasi penanaman modal langsung dan investasi portofolio. PMA langsung lebih disukai dibandingkan investasi portofolio, karena cenderung

lebih stabil dan biasanya memberikan eksternalitas positif lebih besar untuk meningkatkan perekonomian negara tuan rumah, dibandingkan dengan investasi portofolio. Kuat tidaknya pengaruh investasi terhadap lapangan kerja tergantung pada kebijakan nasional negara tuan rumah untuk mengarahkan investasi yang lebih padat karya dan meningkatkan kualitas kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusianya. Investasi yang bersifat padat karya memiliki dampak kuantitatif yang signifikan dalam menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi pengangguran, sebaliknya investasi yang bersifat pada teknologi dan pengetahuan hanya memiliki dampak pada upah yang lebih tinggi, kondisi kerja yang lebih baik, tapi kurang mampu menyerap banyak lapangan kerja (Jumhur, 2019).

2.10 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu disajikan untuk melihat relevansi penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu serta dapat dijadikan dasar untuk penelitian berikutnya. Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya:

Hasil penelitian Nur Ravika Famala Sari pada tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari PDRB, UMK, investasi, dan pengeluaran pemerintah terhadap pengangguran terdidik di Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran terdidik. Sedangkan UMK dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran terdidik.

Hasil penelitian Jihad Lukis Panjawa dan Daryono Soebagiyo pada tahun 2014. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor penentu tingkat pengangguran se-Karesidenan Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

upah minimum dan jumlah penduduk memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengangguran.

Hasil penelitian Amirul Muminin dan Wahyu Hidayat pada tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Setiap terjadi kenaikan jumlah penduduk maka tingkat pengangguran terbuka juga akan naik.

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Konseptual

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro ekonomi. Suatu perekonomian dikatakan tumbuh jika terjadi kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam satu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perekonomian yang terus tumbuh dan berkembang akan menyediakan berbagai lapangan pekerjaan yang menyerap pekerja dari penduduk yang usia produktif. Pemerintah sebagai penentu kebijakan ekonomi menentukan jumlah upah minimum yang diperoleh pekerja yang mencukupi bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga.

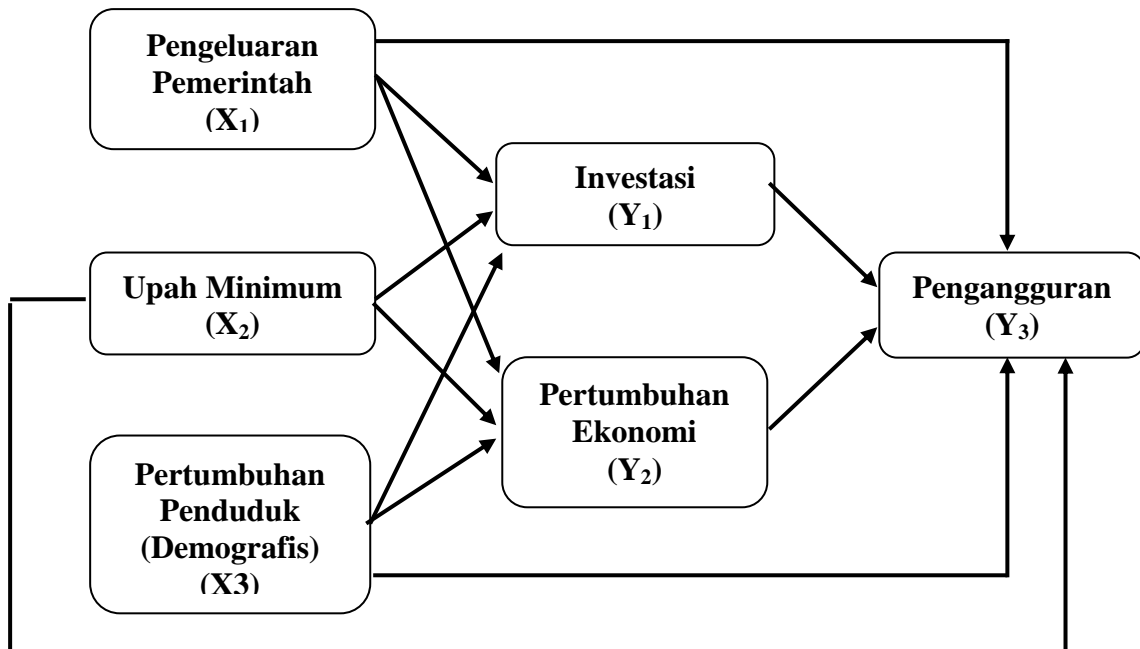
Investasi merupakan sebuah bentuk pengeluaran modal yang bertujuan untuk pembelian suatu barang hasil produksi yang akan dijadikan aset untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dari pada modal awal. Investasi terlibat dalam berbagai bidang ekonomi, seperti manajemen bisnis dan keuangan baik untuk rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Secara umum investasi diartikan sebagai pengeluaran untuk membeli barang dan modal serta perlengkapan produksi guna menambah kemampuan produksi barang dan jasa dalam perekonomian. Pertambahan jumlah barang modal memungkinkan perekonomian tersebut menghasilkan lebih banyak barang dan jasa di masa yang akan datang. Kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja,

meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Investasi akan mendorong dunia usaha untuk terus memproduksi yang juga berdampak pada terbukanya kesempatan kerja yang lebih luas.

Pengeluaran pemerintah merupakan alokasi anggaran yang disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya ke berbagai sektor atau bidang dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat melalui bermacam-macam program. Pengeluaran pemerintah dapat membantu menciptakan lapangan kerja di berbagai sektor industri baik skala besar maupun skala kecil sehingga membantu masyarakat untuk memperoleh pekerjaan. Semakin banyak lapangan kerja yang menyerap tenaga kerja akan mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa indikator makro ekonomi yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pengeluaran pemerintah memberi dampak bagi besar kecilnya pengangguran di Indonesia. Demikian pula dengan upah minimum. Jika upah minimum yang ditetapkan pemerintah dapat mencukupi kebutuhan hidup pekerja, maka setiap pencari kerja akan tertarik untuk bekerja sehingga pengangguran berkurang. Dari segi pertumbuhan penduduk juga akan berdampak pada pengangguran. Semakin banyak jumlah penduduk maka dibutuhkan banyak lapangan pekerjaan. Kurangnya daya serap dunia kerja dapat berakibat pada bertambahnya pengangguran.

Adapun kerangka konseptual penelitian digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Konseptual Penelitian

3.2 Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- H_1 = Pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap pengangguran secara langsung dan tidak langsung melalui investasi dan pertumbuhan ekonomi.
- H_2 = Upah minimum berpengaruh positif terhadap pengangguran secara langsung dan tidak langsung melalui investasi dan pertumbuhan ekonomi.
- H_3 = Demografis berpengaruh positif terhadap pengangguran secara langsung dan tidak langsung melalui investasi dan pertumbuhan ekonomi.